



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TATIK RUWIYANTI
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 803718

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 680.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/100 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 90 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.500.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 98.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOTOR, HONDA CRF 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000
4. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
5. MOTOR, HONDA F1C02N46L0 A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 10.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 864.500.000**III. HUTANG** Rp. 36.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 828.500.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : TAFIANINHSIH
- Jabatan : BENDAHARA
- NHK : 910379

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	260.000.000
1. Tanah Seluas 130 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN		
260.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	170.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2018, HASIL SENDIRI		
170.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	21.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	461.000.000
III. HUTANG	Rp.	360.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	101.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NUR HIDAYAH**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)**
3. NHK : **797306**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.104.000.000

1. Tanah Seluas 287 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 92 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 152.000.000
4. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 302.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 146.000.000

1. MOTOR, HONDA A1F02N37M1 A/T (VARIO 125) Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU F7OORG TX MT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 121.800.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 98.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.469.800.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.469.800.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRASETIYO NUGROHO
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 732234

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.710.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 440 m2/125 m2 di KAB / KOTA KLATEN, WARISAN		Rp. 325.000.000
2. Tanah Seluas 934 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI		Rp. 185.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m2/250 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI		Rp. 1.200.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	100.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA TIPE E Tahun 2013, HASIL SENDIRI		Rp. 100.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.900.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	80.800.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.894.700.000
III. HUTANG	Rp.	240.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.654.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UNTUNG KURNIAWAN**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **619739**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **606.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m²/80 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 83 m²/80 m² di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m²/100 m² di KAB / KOTA KLATEN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 86.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **59.900.000**

1. MOBIL, CHEVROLET SPIN LT 1.2 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 56.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **14.890.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **---****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **875.391.858****F. HARTA LAINNYA** Rp. **300.000****Sub Total** Rp. **1.556.481.858****III. HUTANG** Rp. **8.500.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.547.981.858**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUNARDI**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)**
3. NHK : **683035**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **210.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **114.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA MPV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 74.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, HONDA TGR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
4. MOTOR, HONDA MATIC/VARIO 150 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **2.500.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **2.000.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **329.000.000**

III. HUTANG Rp. **2.500.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **326.500.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN
2. Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
3. NHK : 763439

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 219.260.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 148.300.000
2. Tanah Seluas 174 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 70.960.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 176.500.000

1. MOBIL, HONDA BRIO SATYA E MT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
3. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 32.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 5.200.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 13.059.170**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 414.019.170**III. HUTANG** Rp. 14.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 400.019.170

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : MIDDIA MARTANTI DEWI
- Jabatan : PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)
- NHK : 468820

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	325.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/100 m2 di KAB / KOTA KLATEN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	43.000.000
1. MOBIL, HYUNDAI ATOZ Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. MOTOR, HONDA VARIO 110 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	51.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.992.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	420.992.000

III. HUTANG Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 410.992.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

